

STUDIA ADMINISTRASI

Optimalisasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Pangkalpinang

Darol Arkum¹, Widya Handini², Risky Kurniawan³

STISIPOL Pahlawan 12^{1,2,3}

Koresponding Email: widyahandinii@gmail.com

ABSTRAK

Kota Pangkalpinang merupakan salah satu kota yang jumlah sampahnya meningkat setiap tahun. Jumlah sampah terus bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk. Kota Pangkalpinang mengumpulkan 150 hingga 200 ton sampah dari warga setiap hari, sedangkan TPA seluas 2,5 hektar dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 jiwa telah melebihi kapasitasnya. Selain itu, jika fasilitas ini tidak dioperasikan secara maksimal, Kota Pangkalpinang akan kesulitan dalam memenuhi tugas pengelolaan sampahnya. Akibatnya, sampah menumpuk dan menimbulkan banyak dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pangkalpinang dilaksanakan dan mencari solusi untuk optimalisasi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pangkalpinang. Dalam 10 tahun terakhir, beberapa penelitian tentang pengelolaan sampah di Kota Pangkalpinang telah dilakukan. Namun penelitian terkait implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pangkalpinang belum pernah dikaji. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dan perlu dilakukan untuk menganalisis dan memaksimalkan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pangkalpinang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, FGD (*Focus Group Discussion*), wawancara mendalam, dokumentasi serta pengumpulan data sekunder terkait Perda Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Pangkalpinang. Langkah selanjutnya adalah mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Dimana data sekunder terkait kebijakan sampah di Kota ini akan dikaji dari uraian isi, pelaksanaan dan bukti empiris. Selain itu aspek penting Teori Implementasi Kebijakan (Komunikasi, Sumber Daya, Birokrasi dan Disposisi) akan di analisis dan dibandingkan dengan realita yang ada di Kota Pangkalpinang.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Pengelolaan Sampah; Kebijakan Lingkungan

STUDIA ADMINISTRASI

ABSTRACT

Pangkalpinang City is one of the cities where the amount of waste increases every year. The amount of waste continues to increase along with population growth. The City of Pangkalpinang collects 150 to 200 tons of waste from residents every day, while the 2.5 hectare landfill with a population of more than 250,000 people has exceeded its capacity. Apart from that, if this facility is not operated optimally, Pangkalpinang City will have difficulty fulfilling its waste management duties. As a result, waste accumulates and causes many negative impacts on the environment and public health. The purpose of this research is to find out how the implementation of waste management policies in Pangkalpinang City is carried out and find solutions to optimize the implementation of waste management policies in Pangkalpinang City. In the last 10 years, several studies on waste management in Pangkalpinang City have been carried out. However, research related to the implementation of waste management policies in Pangkalpinang City has never been studied. Therefore, this research has a novelty and needs to be done to analyze and maximize the implementation of waste management policies in Pangkalpinang City. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out through observation, FGD (Focus Group Discussion), in-depth interviews, documentation and secondary data collection related to the Regional Regulation on Waste Management Policy in Pangkalpinang City. The next step is to reduce the data, present the data and draw conclusions. Where secondary data related to waste policy in this city will be studied from a description of the content, implementation and empirical evidence. Besides that, important aspects of Policy Implementation Theory (Communication, Resources, Bureaucracy and Disposition) will be analyzed and compared with the reality in Pangkalpinang City.

.Keywords: Policy Implementation; Waste Management; Environmental Policy

PENDAHULUAN

Sampah perkotaan merupakan salah satu masalah kompleks yang dihadapi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Pengelolaan sampah yang tidak tertata dengan baik dapat menimbulkan gangguan kesehatan karena menimbulkan berbagai penyakit, bau tidak sedap, pencemaran tanah dan air, serta kurangnya nilai kebersihan dan estetika lingkungan (Nugraha et al., 2018).

Kebijakan sampah di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Pengelolaan Sampah No. 18 Tahun 2008 (UU Pengelolaan Sampah). Belakangan, pemerintah membuat regulasi turunan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2012 tentang Sampah Rumah Tangga dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan PP No. Peraturan 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Khusus. Menurut Undang-Undang Pengelolaan Sampah (UU RI, 2008), pertumbuhan penduduk dan perubahan kebiasaan konsumsi masyarakat telah menyebabkan peningkatan

STUDIA ADMINISTRASI

jumlah, jenis dan karakteristik jenis sampah yang berbeda. Konsumsi senyawa tersebut dalam bentuk makanan dan barang kemasan, terutama kemasan yang tidak terurai sempurna dalam waktu singkat (seperti kantong plastik) dapat menyebabkan bertambahnya kantong plastik setiap tahunnya yang menyebabkan gangguan kesehatan bagi manusia dan merusak lingkungan sekitar. Pengelolaan sampah harus dilaksanakan secara holistik dan terpadu dari awal hingga akhir untuk mendatangkan manfaat maksima baik untuk kesehatan bagi masyarakat dan lingkungan, serta mampu mengubah perilaku masyarakat. Permasalahan sampah harus ditangani secara serius dengan pendekatan teknis, operasional dan manajemen yang tepat dan terpadu berdasarkan kondisi dan praktik masing-masing sektor (Darmanto, 2012).

Kota Pangkalpinang merupakan salah satu kota yang jumlah sampahnya meningkat setiap tahunnya. Jumlah sampah terus bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk. Kota Pangkalpinang mengumpulkan 150-200 ton sampah setiap hari dari warga, sementara TPA seluas 2,5 hektar di kawasan ini sudah melebihi kapasitasnya dengan lebih dari 250.000 warga. Timbulan sampah yang dihasilkan oleh penduduk Pangkalpinang tahun 2018 sebanyak 208.520 jiwa adalah 232.136,35 ton per tahun dan yang hanya dapat dikelola sebesar 141.193,19 ton per tahun (DLH Pangkalpinang, 2018). Jumlah sampah yang besar ini tidak disertai dengan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik. Sampai saat ini pengelolaan sampah kota Pangkalpinang masih mengikuti sistem lama pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan sampah. Di sisi lain, masalah pembuangan sampah terus menjadi tema yang berulang. Permasalahan pengelolaan sampah di Kota Pangkalpinang belum terselesaikan dengan baik, seperti permasalahan pengelolaan sampah di TPA Parit Enam Kota Pangkalpinang yang mengganggu aktivitas masyarakat. Pengelolaan sampah di Pangkalpinang bergantung pada keberadaan TPA Parit Enam. Jika fasilitas ini tidak optimal dalam pengoperasiannya, Pemerintah Kota Pangkalpinang akan kesulitan dalam menunaikan tugas pengelolaan sampah. Akibatnya, sampah menumpuk dan menimbulkan banyak akibat negatif baik itu untuk lingkungan maupun Kesehatan masyarakat. Tidak hanya itu, secara nyata, bau menyengat yang timbul dari TPA Parit Enam di Kota Pangkalpinang sudah sangat mengganggu aktifitas masyarakat sehari-hari.

Selain itu, masalah penting dalam pengelolaan sampah kota ini adalah rendahnya fasilitas dan kapasitas yang dimiliki oleh instansi terkait dibandingkan dengan jumlah sampah

STUDIA ADMINISTRASI

yang ditangani. Pemerintah daerah berhak menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah merupakan salah satu produk kebijakan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang ditujukan kepada masyarakat dalam rangka pengelolaan sampah Kota Pangkalpinang. Oleh karena itu, penerapan kebijakan pengelolaan sampah diperlukan untuk mewujudkan lingkungan perkotaan yang bersih dan sehat.

Adapun rumusan masalah penelitian antara lain; 1) Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kota pangkalpinang? 2) Bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kota pangkalpinang dapat berjalan maksimal?

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Beberapa penelitian telah dilaksanakan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir seperti penelitian tentang pemanfaatan dan peningkatan pengelolaan sampah di Pangkalpinang (Ningsih, 2021), kemudian penelitian tentang Model Sistem Pendukung Penentuan TPA di Pangkalpinang (Magdalena et al., 2019), penelitian tentang pengetahuan masyarakat dan pendataan terhadap komposisi sampah pesisir di kota Pangkalpinang (Sari dan Pratiwi, 2020). Selanjutnya terdapat penelitian tentang Pengaruh Reduksi Sampah Rumah Tangga Berbasis Program 3R di Kota Pangkalpinang menggunakan pemodelan sistem dinamik (Fitriyansyah, 2021). Kemudian penelitian tentang desain sistem informasi retribusi sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang (Rochmayani dan Rahayuningsih, 2018). Namun penelitian tentang kebijakan pengelolaan sampah terutama pada kasus Kota Pangkalpinang belum pernah dilakukan. Sehingga terdapat kebaruan dalam penelitian ini serta dibutuhkan untuk menganalisis dan memaksimalkan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pangkalpinang.

METODE

Lokasi penelitian terletak di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kota Pangkalpinang dilakukan dan mencari cara untuk mengoptimalkan

STUDIA ADMINISTRASI

implementasi kebijakan tersebut di kota Pangkalpinang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan meliputi observasi, *Focus Group Discussion* (FGD), wawancara dan dokumentasi.

Menurut UU No. 18 tahun 2008 (UU RI, 2008), setiap pemerintah kabupaten dan kota harus memenuhi kewajibannya dalam pengelolaan sampah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tata cara pelaksanaan pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab masing-masing daerah. Tujuan evaluasi kebijakan publik adalah untuk menilai tingkat efektivitas kebijakan yang sedang dilaksanakan. Jika suatu praktik memiliki keterkaitan antara implementasi dan tujuan yang ditetapkan, maka praktik tersebut tergolong berhasil. Implementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi, sebuah kebijakan hanyalah sebuah dokumen yang tidak memiliki arti di masyarakat (Widodo, 2021). Pemerintah dapat membuat banyak kebijakan yang dirumuskan dengan bantuan ahli dari dalam dan luar negeri, namun kemudian ternyata tidak berdampak pada kehidupan negara karena tidak dapat atau tidak dapat dilaksanakan (Izzaty dan Sari, 2013). Kajian implementasi peraturan daerah pengelolaan sampah ditinjau dari 4 (empat) perspektif berdasarkan teori Implementasi Kebijakan Edward III (Subarsono, 2005) yaitu komunikasi, sumber daya, birokrasi dan disposisi. Ruang lingkup penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 1.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang (Kepala DLH Kota Pangkalpinang, Kepala Bidang Persampahan di DLH Kota Pangkalpinang, dan Staff yang bertugas mengangkut sampah) dan Bappeda Kota Pangkalpinang. Selain itu juga dilakukan observasi langsung dan FGD (*Focus Group Discussion*) untuk mengetahui kompleksnya permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya di Kota Pangkalpinang. Data sekunder didapatkan dari studi kepustakaan. Selanjutnya identifikasi informan dilakukan dengan sengaja (*on purpose*). Data hasil wawancara, observasi, FGD dan data sekunder dikumpulkan kemudian diolah serta dianalisis secara kualitatif.

Tahapan dalam penelitian metode kualitatif diawali dengan identifikasi masalah, dilanjutkan dengan kajian literatur, penjelasan tujuan penelitian, pengumpulan data, observasi, pengambilan sampel, wawancara, pertanyaan etis, dan analisis data (Bungin, 2004). Pada saat menganalisis data dilakukan reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk mengkategorikan data yang diperoleh dari proses pengumpulan data primer

STUDIA ADMINISTRASI

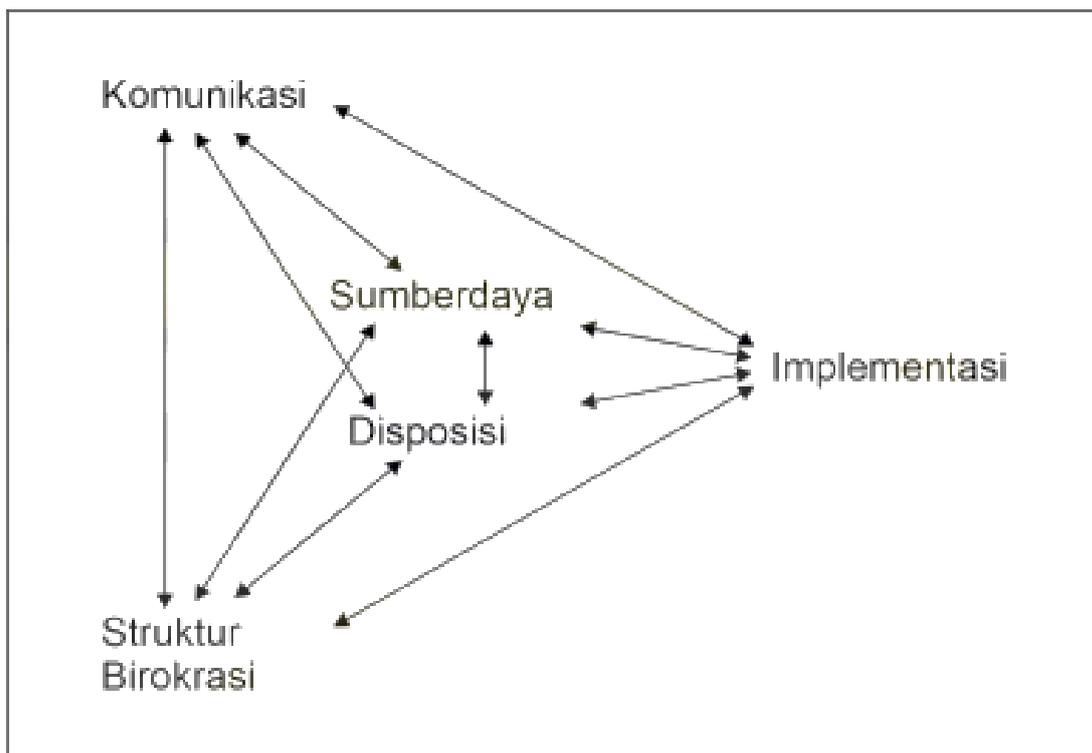
dan sekunder. Reduksi data adalah proses seleksi yang berfokus pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah dari catatan lapangan. Data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih akurat dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan lebih banyak informasi jika diperlukan. Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah menyajikan data. Materi disajikan dalam bentuk teks deskriptif dimana hasil penelitian yang diperoleh didiskusikan dan diperdebatkan dengan bantuan tambahan gambar, tabel atau diagram. Penyajian informasi dirancang agar data yang dihasilkan tertata dan tersusun dalam pola relasional agar lebih mudah dipahami. Penyajian data dapat berupa deskripsi naratif, diagram, hubungan antar kelas, dan flowchart. Penyajian data dalam format ini memudahkan peneliti untuk memahami apa yang sedang terjadi (Miles dan Huberman, 1992). Pada fase ini, peneliti berusaha mengumpulkan data yang relevan agar informasi yang diperoleh disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian. Hasil yang ditampilkan adalah Deskripsi aspek-aspek penting dari implementasi kebijakan, seperti birokrasi, organisasi, sumber daya dan komunikasi

Tahap ketiga adalah menarik kesimpulan dari penelitian yang diterima dan rekomendasi kepada masyarakat. Membuat atau memverifikasi inferensi adalah upaya untuk menemukan atau memahami makna/makna, keteraturan, pola, penjelasan, alur sebab akibat, atau proposisi. Sebelum penarikan kesimpulan dilakukan pembersihan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau review kegiatan sebelumnya.

Peneliti akan menggunakan teori dari Edward III dalam penelitian ini. Dalam pandangan Edward III (1980), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni : 1. Komunikasi. Agar implementasi kebijakan berhasil, pelaksana harus tahu apa yang harus dilakukan. Ini harus mengkomunikasikan kepada kelompok sasaran apa tujuan dan sasaran kebijakan untuk mengurangi distorsi implementasi. 2. Sumberdaya. Meskipun isi kebijakan dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, namun jika pelaksana kekurangan sumber daya untuk mengimplementasikannya, implementasinya tidak akan efektif. 3. Disposisi. Disposisi adalah watak dan sifat yang dimiliki oleh pelaksana, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Jika pelaksana memiliki kecenderungan yang baik, ia akan dapat mengimplementasikan kebijakan dengan cara yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika pelaksana memiliki sikap atau cara pandang yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka

STUDIA ADMINISTRASI

proses implementasi kebijakan juga tidak akan efektif. 4. Struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan memiliki dampak yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek struktural terpenting dari organisasi mana pun adalah memiliki prosedur operasi standar (*Standard Operating Procedural* atau SOP). SOP adalah panduan cara untuk setiap tindakan.



Gambar 1. Faktor penentu implementasi menurut Edward III

Sumber : Edwards III, 1980

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pendekatan ini, ada empat faktor kunci yang memiliki peran besar dalam menentukan kesuksesan pelaksanaan suatu kebijakan, yakni: (1) Komunikasi, (2) Sumberdaya, (3) Disposisi, dan (4) Struktur Birokrasi. Menurut Edward III, untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan publik dengan sukses, komunikasi yang efektif adalah hal yang sangat penting. Pengambil keputusan perlu memahami dengan baik setiap tugas yang harus mereka

STUDIA ADMINISTRASI

lakukan dalam rangka implementasi, dan isi kebijakan harus disampaikan dengan jelas kepada pihak yang terpengaruh.

Faktor utama di antaranya adalah komunikasi, yang berpengaruh signifikan pada penerimaan informasi. Distribusi isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik memiliki dampak besar pada pelaksanaan kebijakan. Di Dinas lingkungan hidup Kota Pangkalpinang, Komunikasi Dari Atasan Ke Bawahan Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkal Pinang Yakni Top Down (Atas Ke Bawah) Dan Bottom Up (Bawah ke atas) melalui rapat pertemuan internal antar bidang, bidang-bidang tertentu dengan kepala dinas, selain itu komunikasi antara atasan dengan bawahan juga sering melalui *whatsapp group* guna memudahkan komunikasi dan tersampaikan secara cepat antara atasan dan bawahan. Dinas lingkungan hidup Kota Pangkalpinang biasanya mengadakan Forum internal baik secara langsung maupun secara online untuk membahas dan mengevaluasi kinerja dan program kerja.

Selain itu, DLH Kota Pangkalpinang juga mengadakan forum eksternal seperti forum kerja sama antar dinas, swasta, dan forum pertemuan ke sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan sekolah adiwiyata dan menjaga lingkungan. Dinas lingkungan hidup Kota Pangkalpinang mengadakan pertemuan dengan pihak mitra kerja antara sesama dinas dan swasta untuk membahas CSR (*Corporate Social Responsibility*), surat izin, dan program kerja, serta komunikasi melalui *smartphone*. Rapat yang dilaksanakan berupa *system hybrid* yang merupakan perpaduan antara offline dan online.

Kemudian terkait dengan komunikasi dari DLH ke Masyarakat, DLH Pangkal Pinang melakukan sosialisasi langsung masyarakat mengenai kebijakan pengelolaan sampah, selain sosialisasi ke masyarakat pihak DLH juga melakukan sosialisasi ke beberapa stakeholder antara lain, kelurahan, instansi pemerintah, swasta, sekolah adiwiyata, dan ke lembaga-lembaga serta memanfaatkan *baleho* di jalan-jalan untuk mensosialisasikan pengelolaan sampah. Komunikasi dari Pihak DLH ke masyarakat dilakukan secara tatap muka, pasang *baleho*, melalui *blogspot* dan juga memanfaatkan sosial media seperti Instagram, facebook, dan youtube. Selain itu, Pihak DLH menyediakan email dan sosial media seperti instagram “akun dinas dan bidang kebersihan dan website agar dapat di hubungi oleh masyarakat. Selain itu DLH juga melakukan sosialisasi melalui perantara seperti kelurahan untuk di sosialisasikan kepada masyarakat.

STUDIA ADMINISTRASI

Salah satu aspek penting dalam komunikasi adalah konsistensi, yaitu menjaga agar isi kebijakan tetap konsisten dan tidak berubah-ubah agar tidak menimbulkan kebingungan. Oleh karena itu, komunikasi harus dilakukan secara efektif dan efisien, dengan menjelaskan manfaat kebijakan kepada kelompok sasaran, baik dari segi lingkungan maupun ekonomi. DLH Kota Pangkalpinang sudah terlihat konsisten dalam mengkomunikasikan hal penting baik itu dengan pihak internal maupun eksternal terkait program kerja yang dijalankan. Namun perlu perbaikan dalam manajemen media social yang penting sebagai media penghubung dengan Masyarakat, karena media social yang disediakan seperti Instagram kurang aktif dan kurang dimanfaatkan secara optimal.

Implementasi kebijakan dapat berhasil atau gagal tergantung pada seberapa baik komunikasi dilakukan. Komunikasi yang efektif adalah kunci utama untuk mencapai implementasi yang efektif. Oleh karena itu, distribusi isi kebijakan harus dilakukan dengan jelas dan konsisten untuk menghindari distorsi dalam pelaksanaan, seperti yang dikemukakan oleh Edward III (1980). Meskipun komunikasi yang sempurna mungkin sulit dicapai, langkah-langkah dapat diambil untuk meminimalisir kesalahan dan meningkatkan koordinasi komunikasi.

Aspek yang kedua yaitu sumber daya. Dalam aspek sumber daya, hal penting yang diteliti lebih dalam adalah sumber daya manusia dan anggaran. Terkait sumber daya manusia, SDM DLH mempunyai di posisinya masing-masing, Jumlah SDM Pengelolaan Sampah ada 422 orang termasuk sopir, kenet, tukang sapu, dan “petugas lapangan” di bagian kantor DLH. Terdapat beberapa yang latar belakang pendidikan staff yang memang tidak sesuai dengan tanggung jawab, tetapi untuk saat ini menurut pihak DLH sejalan atau tidak background pendidikan kinerja tetap mumpuni. Selain itu terdapat juga staff yang sejalan dengan background pendidikan sesuai dengan tanggung jawab.

Terkait anggaran, Kondisi anggaran pengelolaan sampah masih kurang, semestinya setiap tahun anggaran pengelolaan sampah meningkat, karena setiap tahun jumlah sampah dan jumlah penduduk meningkat. Kenyataannya anggaran tidak meningkat. Anggaran yang ada terserap habis untuk pengelolaan sampah dimana “anggaran minim kerjaan maksimal”.

STUDIA ADMINISTRASI

Proses penentuan anggaran pengelola sampah di tentukan oleh usulan dari BAPPEDA Kota Pangkal Pinang, tentunya DLH mengajukan anggaran untuk pengelolaan sampah, mulai dari penanganan sampah, gaji, dan biaya operasional armada pengangkut sampah. Namun penentuan anggaran akan di tentukan saat Rapat anggaran yang di ketua oleh Sekretaris Daerah (SEKDA).

Terkait fasilitas, Fasilitas yang disediakan di bidang pengelolaan sampah meliputi armada pengangkut sampah yang terdiri dari 84 unit mobil pick up, 20 unit mobil truk, 4 unit mobil armroll, serta mesin pencaca “Kompos”.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sumber daya dalam pengelolaan sampah di DLH Kota Pangkalpinang masih belum optimal. Dalam hal sumber daya manusia, sudah ada kecukupan pegawai yang memiliki keahlian yang sesuai dengan tugas yang dibutuhkan, namun masih terdapat petugas yang tidak sesuai dengan latar belakangnya.

Berikut adalah beberapa alasan mengapa pendidikan yang sesuai dengan tugas staff Dinas Lingkungan Hidup sangat penting:

- **Kepahaman Mendalam tentang Lingkungan Hidup:** Pendidikan yang relevan membantu staff Dinas Lingkungan Hidup memahami isu-isu lingkungan yang kompleks dan mendalam. Ini termasuk pemahaman tentang masalah lingkungan, proses-proses ekologi, dan dampak dari kebijakan dan tindakan manusia terhadap lingkungan.
- **Pengembangan Keterampilan Teknis:** Staff Dinas Lingkungan Hidup memerlukan keterampilan teknis dalam berbagai bidang seperti pemantauan lingkungan, pengelolaan limbah, pengawasan perizinan, dan perlindungan sumber daya alam. Pendidikan yang sesuai membantu mereka mengembangkan keterampilan ini.
- **Pengetahuan tentang Peraturan dan Kebijakan Lingkungan:** Lingkungan hukum dan regulasi berubah-ubah. Staff yang terdidik dapat lebih efektif dalam memahami, menginterpretasikan, dan menerapkan peraturan dan kebijakan yang relevan.
- **Kemampuan Analisis dan Pengambilan Keputusan:** Pendidikan yang sesuai membantu staff mengembangkan kemampuan analisis dan pengambilan

STUDIA ADMINISTRASI

keputusan yang baik. Mereka dapat menganalisis data lingkungan, mengevaluasi dampak potensial, dan membuat keputusan yang berkelanjutan.

- Peningkatan Kesadaran Lingkungan: Pendidikan juga dapat membantu meningkatkan kesadaran staff terhadap pentingnya pelestarian lingkungan dan tanggung jawab mereka dalam menjaganya.
- Efektivitas dalam Melaksanakan Tugas: Staff yang terdidik lebih cenderung bekerja lebih efektif dalam menjalankan tugas mereka. Mereka dapat mengidentifikasi solusi yang lebih baik dan menerapkan praktik terbaik dalam pengelolaan lingkungan.
- Komunikasi yang Lebih Baik: Pendidikan yang relevan membantu staff dalam berkomunikasi dengan baik, baik dengan publik, pemangku kepentingan, atau kolega. Ini penting untuk membangun dukungan dan kerja sama dalam upaya pelestarian lingkungan.

Dengan pendidikan yang sesuai, staff Dinas Lingkungan Hidup dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam menjaga dan melindungi lingkungan hidup khususnya terkait pengelolaan sampah, serta menciptakan kebijakan dan tindakan yang lebih berkelanjutan.

Kemudian, dalam hal sumber daya anggaran, masih terdapat permasalahan yakni kekurangan dana disaat timbulan sampah meningkat setiap tahun berbanding lurus dengan peningkatan jumlah populasi manusia. Seharusnya dalam hal pendanaan, anggaran terkait pengelolaan sampah di prioritaskan karena hal ini merupakan hal penting yang perlu ditangani. Tanpa dana atau anggaran yang cukup, maka pengelolaan sampah tidak akan berjalan dengan maksimal.

Agar anggaran pengelolaan sampah dapat tercukupi dalam sebuah kabupaten, berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil:

- Perencanaan yang Baik: Mulai dengan merumuskan rencana pengelolaan sampah yang komprehensif dan berkelanjutan. Rencana ini harus mencakup estimasi kebutuhan anggaran untuk mengelola sampah, termasuk pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, dan daur ulang.

STUDIA ADMINISTRASI

- **Evaluasi Sumber Pendapatan:** Tinjau berbagai sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk membiayai pengelolaan sampah. Ini termasuk pendapatan pajak, retribusi sampah, dana hibah, dan lainnya.
- **Optimalkan Pendapatan Pajak:** Pastikan bahwa semua potensi pendapatan pajak yang terkait dengan pengelolaan sampah dimanfaatkan dengan baik. Ini dapat mencakup pajak sampah atau pajak terkait lingkungan lainnya.
- **Implementasikan Retribusi Sampah:** Perkenalkan atau tingkatkan sistem retribusi sampah. Retribusi ini dapat dikenakan kepada penduduk, bisnis, atau entitas yang menghasilkan sampah. Dengan sistem retribusi yang efektif, pemerintah kabupaten dapat mengumpulkan dana yang dapat digunakan untuk pengelolaan sampah.
- **Cari Pendanaan Tambahan:** Selain pendapatan lokal, cari sumber pendanaan tambahan seperti hibah dari pemerintah pusat atau badan internasional yang mendukung proyek-proyek lingkungan.
- **Efisiensi dalam Pengelolaan Sampah:** Dorong efisiensi dalam pengelolaan sampah. Ini termasuk penggunaan teknologi yang efisien, optimasi rute pengangkutan, dan pengurangan pemborosan.
- **Promosikan Daur Ulang:** Upayakan untuk meningkatkan praktik daur ulang. Daur ulang dapat mengurangi volume sampah yang harus dikelola dan bahkan menghasilkan pendapatan tambahan melalui penjualan bahan daur ulang.
- **Partnership dengan Sektor Swasta:** Pertimbangkan untuk bermitra dengan perusahaan swasta dalam pengelolaan sampah. Mereka dapat membantu dalam investasi infrastruktur dan memberikan kontribusi keuangan.
- **Penyadaran Masyarakat:** Lakukan program penyadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan. Masyarakat yang sadar lingkungan lebih mungkin mendukung upaya pengelolaan sampah dan membayar retribusi dengan baik.

STUDIA ADMINISTRASI

- **Pengawasan dan Pengendalian Keuangan:** Pastikan pengawasan keuangan yang ketat untuk menghindari pemborosan dan penyalahgunaan dana. Audit keuangan yang teratur juga diperlukan untuk memastikan akuntabilitas.
- **Perencanaan Jangka Panjang:** Pertimbangkan untuk merencanakan jangka panjang dalam hal pengelolaan sampah dan penganggaran. Ini membantu mengantisipasi kebutuhan finansial di masa depan.
- **Lakukan Evaluasi Rutin:** Lakukan evaluasi rutin terhadap program pengelolaan sampah dan anggaran yang ada untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dan efisiensi tambahan.

Penting untuk memastikan bahwa anggaran pengelolaan sampah memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan lingkungan, sambil memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efisien dan transparan.

Seperti yang diungkapkan oleh Edward III (1980), meskipun komunikasi isi kebijakan sudah dilakukan secara jelas dan konsisten, keberhasilan implementasi akan terhambat jika tidak didukung oleh sumber daya yang memadai. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, anggaran, termasuk fasilitas. Sumber daya merupakan salah satu faktor kunci yang diperlukan untuk mencapai implementasi kebijakan yang efektif.

Aspek selanjutnya adalah disposisi. Dalam hal disposisi, pihak DLH berkomitmen melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan dan ketentuan yang ada, agar tidak terjadi penumpukan sampah di TPS (Tempat Pembuangan Sementara) dan tidak ada keluhan dari masyarakat. Sikap Pemerintah daerah mendukung program yang dilaksanakan terkait dengan pengelolaan sampah. Temuan ini sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn seperti yang disebutkan dalam (Subarsono, 2021), yang menyatakan bahwa disposisi implementor mencakup tiga aspek kunci: (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang memengaruhi sejauh mana implementor bersedia melaksanakan kebijakan; (b) kognisi, yaitu pemahaman implementor tentang kebijakan; dan (c) intensitas disposisi implementor, yang mencerminkan nilai-nilai yang dipegang oleh implementor. Disposisi memegang peran penting dalam proses pelaksanaan kebijakan, sejalan dengan pandangan Edward III dalam (Subarsono, 2021) yang menyatakan bahwa implementor yang memiliki disposisi yang positif akan menjalankan

STUDIA ADMINISTRASI

kebijakan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan. Namun, jika implementor memiliki pandangan atau sikap yang berbeda, proses implementasi kebijakan dapat menjadi tidak efektif.

Namun di balik itu semua, perlu ada dukungan yang ekstra mulai dari dukungan anggaran, penambahan armada pengangkut sampah, dan teknologi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, dukungan Masyarakat, pihak swasta, dan organisasi yang terkait. Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam (Subarsono, 2021), program yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan lebih mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan untuk mengubah sikap. Oleh karena itu, penting bagi DLH Pangkalpinang untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilahan sampah, sehingga tidak semua sampah akhirnya berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Dengan melakukan sosialisasi yang berkelanjutan, sikap dan pandangan masyarakat terhadap sampah dapat berubah secara bertahap sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah sejalan dengan disposisi positif dari pelaksana kebijakan.

Aspek yang terakhir adalah struktur birokrasi. Di DLH kota Pangkalpinang, Pembagian kewenangan dan tanggung jawab terbagi menjadi 3 bidang besar yaitu bidang penataan dan pentaatan PPLH (Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 & Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, dan Bidang Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan.

Bidang Pertama yakni Bidang Penataan dan Pentaatan PPLH terbagi menjadi 3 seksi yaitu seksi perencanaan dan kajian lingkungan, seksi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, dan seksi penegakan hukum lingkungan.

Terkait pengelolaan sampah masuk ke bidang/divisi pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas. Bidang ini terbagi menjadi beberapa seksi diantaranya adalah seksi pengelolaan sampah, seksi limbah B3, dan seksi peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Bidang ketiga yaitu Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang terbagi menjadi seksi pencemaran lingkungan, seksi kerusakan lingkungan dan seksi pemeliharaan lingkungan.

Struktur birokrasi yang baik dalam pengelolaan sampah di sebuah kabupaten harus dirancang dengan cermat agar dapat mengoordinasikan semua aspek pengelolaan sampah

STUDIA ADMINISTRASI

dengan efisien dan efektif. Berikut adalah beberapa komponen penting dalam struktur birokrasi yang baik dalam pengelolaan sampah di kabupaten:

- Dinas atau Badan Lingkungan Hidup atau Kebersihan: Dinas atau badan yang khusus bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dan/atau kebersihan. Badan ini harus memiliki bagian yang mengkhususkan diri dalam pengelolaan sampah.
- Divisi Pengelolaan Sampah: Dalam dinas atau badan lingkungan hidup, ada divisi atau unit yang bertanggung jawab secara langsung atas pengelolaan sampah. Divisi ini akan mengoordinasikan semua aspek terkait sampah, termasuk pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, dan daur ulang.
- Biro Perencanaan dan Anggaran: Biro ini bertugas merencanakan dan mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan sampah. Mereka juga memantau penggunaan anggaran dan menyusun laporan keuangan terkait.
- Divisi Pendidikan Lingkungan: Divisi ini bertugas untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan praktik-praktik daur ulang.
- Divisi Inspeksi dan Pengawasan: Divisi ini memantau pelaksanaan pengelolaan sampah, menginspeksi fasilitas-fasilitas pengelolaan sampah, dan memastikan bahwa peraturan lingkungan terpenuhi.
- Unit Teknologi Lingkungan: Unit ini dapat mengkhususkan diri dalam penerapan teknologi dan metode terbaru dalam pengelolaan sampah, seperti pengolahan sampah organik atau pengurangan limbah.
- Divisi Hubungan Masyarakat: Divisi ini bertanggung jawab atas komunikasi dan keterlibatan masyarakat dalam program-program pengelolaan sampah. Mereka juga menangani keluhan dan umpan balik dari masyarakat.
- Unit Keuangan: Unit ini mengelola aspek keuangan, termasuk perencanaan anggaran, pengelolaan dana, dan pelaporan keuangan.

STUDIA ADMINISTRASI

- Tim Penelitian dan Pengembangan: Tim ini fokus pada penelitian dan pengembangan dalam pengelolaan sampah, mencari solusi inovatif, dan mengadopsi praktik-praktik terbaik.
- Staf Lapangan dan Operator Fasilitas: Staf yang bertugas dalam pelaksanaan operasional seperti pengumpulan dan pengangkutan sampah, pengelolaan tempat pembuangan akhir, dan fasilitas pengolahan sampah.

Struktur birokrasi yang baik harus memastikan bahwa ada koordinasi yang baik antara divisi-divisi yang berbeda, dan bahwa semua komponen dari pengelolaan sampah di kabupaten tersebut tercakup. Selain itu, transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah juga harus menjadi bagian dari struktur ini untuk mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan efisien.

Berdasarkan struktur birokrasi kebijakan yang ada di DLH Pangkalpinang, seharusnya lebih di spesifikasikan kembali staff atau pegawai dalam bidang persampahan yang terbagi menjadi sub seksi pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan dan daur ulang. Serta memenuhi divisi-divisi yang telah dijelaskan di paragraph di atas. Struktur birokrasi yang lengkap dan bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan memiliki dampak yang besar pada pelaksanaan kebijakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan secara keseluruhan mengenai pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

a. DLH Kota Pangkalpinang sudah konsisten dalam mengkomunikasikan hal penting baik itu dengan pihak internal maupun eksternal terkait program kerja yang dijalankan. Namun perlu perbaikan dalam manajemen media social yang penting sebagai media penghubung dengan Masyarakat, karena media sosial yang disediakan seperti Instagram kurang aktif dan kurang dimanfaatkan secara optimal.

STUDIA ADMINISTRASI

- b. Sumber daya manusia sudah cukup, seperti yang ditunjukkan oleh mayoritas jumlah pegawai yang sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan. Namun, dalam hal sumber daya anggaran, masih terdapat permasalahan kekurangan anggaran. Diharapkan dalam proses penentuan anggaran, seluruh pihak yang terlibat dapat diundang dan diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat.
- c. Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan sudah menunjukkan komitmen dalam mengimplementasikan kebijakan yang ada, namun dukungan dari masyarakat masih kurang sehingga perlu adanya komunikasi intens kepada masyarakat sehingga dukungan dan kerjasama dari masyarakat dapat berjalan lancar, begitu juga dengan pihak lain seperti pihak swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat dan pihak lain yang terkait.
- d. Struktur birokrasi di DLH Pangkalpinang perlu menambahkan beberapa divisi penting dalam pengelolaan sampah seperti divisi pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan dan daur ulang.

DAFTAR PUSTAKA

Bungin, B. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Darmanto, T. (2012). Implementasi kebijakan tata-kelola persampahan di Kabupaten Jombang. *J Jejaring Adm Publik*, 2, 175–182.

DLH Pangkalpinang. (2018). *Sampah Kota Pangkalpinang*.

EDWARD III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. congressional quarterly press.

Fitriansyah, H. (2021). Pengaruh Reduksi Sampah Rumah Tangga Berbasis Program 3R Di Kota Pangkalpinang Menggunakan Pemodelan Sistem Dinamik. [Link](#)

Izzaty, & Sari, R. (2013). Kebijakan Penetapan Upah Minimum di Indonesia. *J Ekon Kebijakan Publik*, 4(2), 131–145.

STUDIA ADMINISTRASI

Magdalena, H., Santoso, H., Rahayuningsih, H., Rochmayani, K., & Oktoranda, O. (2019). Model Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Kotamadya Pangkalpinang. *CogITo Smart J*, 5(1), 22–34. [Link](#)

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif*. Jakarta: UI press.

Ningsih, S. (2021). Evaluasi Program Pemanfaatan Dan Peningkatan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung.

Nugraha, A., Sutjahjo, S. H., & Amin, A. A. (2018). Analisis Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Jakarta Selatan. *J Pengelolaan Sumberd Alam dan Lingkung (Journal Nat Resour Environ Manag)*, 8(1), 7–14.

Rochmayani, K., & Rahayuningsih, H. (2018). Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Kota Pangkalpinang Metode Analytical Hierarchy Proses... [Link](#)

Sari, E., & Pratiwi, F. D. (2020). Pengetahuan Masyarakat Dan Pendataan Terhadap Komposisi Sampah Pesisir Di Pantai Pasir Padi Kota Pangkalpinang. *J Pesisir Dan Laut Trop*, 8(1), 106.

Subarsono, A. G. (2005). *Public policy analysis*. Yogyakarta: Student Library.

Subarsono, A. (2021). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*(Cetakan X). Pustaka Pelajar.

UU RI. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

STUDIA ADMINISTRASI

Widodo, J. (2021). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik.
Malang: Bayu Media. Media Nusa Creative (MNC Publishing).